

## DAFTAR PUSTAKA

- Archanggela, M., & Herawati, S. G. (2022). *The Effect of Advertising Tax Extensification and Intensification on Regional Tax Revenue*. *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(2), 255-265.
- Atmosoedirdjo, P. (2000). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- HDP, G. D., & Rachman, T. (2019). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Di Kabupaten Keerom. *Dinamis*, 16(2), 1-9.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (n.d.). *Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)*. Diakses pada 1 Juli 2025, dari <https://simbg.pu.go.id/>
- Maggara, T. S., & Frinaldi, A. (2023). Dampak Perubahan Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Padang Pariaman. *AHKAM*, 2(4), 895-900.
- Maharani, D., & Setyawan, I. (2021). *Transisi Kebijakan IMB ke PBG dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan*. *Jurnal Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 4(1), 25–35.
- Manaf, S., & Mahmud, A. (2022). Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Buton. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 33-49.
- Nabasa N, H. P. (2021). *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Di Kota Surabaya (Doctoral Dissertation, Stiesia Surabaya)*.
- Nara, N. (2021). *Intensification and Extensification of Entertainment Taxes to Increase Own-Source Revenue (PAD) in Makassar City*. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(11), 303-312.
- Novasari, A., & Ratnawati, D. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 115-128.
- Nursafitra, M. M. N., & Yunus, M. (2019). Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan*

*Publik*, 5(1), 2460-6162.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (n.d.). *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*. Diakses 2 Juli 2025, dari <https://bengkaliskab.go.id/perangkat-daerah/dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang>

Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah tentang Retribusi Daerah.

Romadhona, A. (2024). Intensifikasi Pajak Reklame Pada Masa Pandemi Covid 19 Oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 153-167.

Sartika, N., & Krisnanda, K. (2020). Penerapan Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 12-19.

Septiyani, I., & Wahyudin, D. (2021). Analisis Penerapan Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(4), 385-395.

Silooy, R. W., Latuamury, J., & Sapulette, S. G. (2023). Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Maluku Tengah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(6), 2630-2638

Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225(87), 48-61.

Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di

Indonesia

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah

Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang bangunan gedung

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  
Daerah

Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.